

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Kemiskinan

a. Pengertian kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau kelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dan memiliki standar tertentu (Badan Pusat Statistik, 2016).

Bank Dunia (*World Bank*) menggunakan nilai pendapatan yang disetarakan dengan dollar sebagai ukurannya. Garis kemiskinan untuk perkotaan ditetapkan 75 dollar Amerika, sedangkan daerah pedesaan ditetapkan sebesar 50 dollar Amerika perkapita per tahun. Sedangkan menurut BPS (Badan Pusat Statistik), tingkat kemiskinan didasarkan pada penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin, dan berupa pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang dimana satu orang memerlukan sebanyak 2100 kilokalori perhari dari 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, dan lain-lain), kemudian konsumsi non makanan terdiri dari 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Dalam arti *proper*, kemiskinan dimaknai sebagai suatu keadaan kekurangan secara ekonomi dan materi lainnya untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam

dimensi yang lebih luas. Chambers (dalam Chriswardani Suryawati, 2005) mengatakan bahwa kemiskinan merupakan suatu *intergrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (*proper*), 2) ketidakberdayaan (*powerless*), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), 4) ketergantungan (*dependence*), dan 5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis.

Hidup dalam garis kemiskinan dapat diartikan dengan hidup serba kekurangan dan standar hidup yang rendah, dengan standar hidup yang rendah berpengaruh terhadap tingkat kesehatan, tingkat pendidikan yang rendah, dan pendapatan yang rendah, tetapi juga terdapat hal lain, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya sendiri tetapi tidak banyak (Chriswardani Suryawati, 2005).

Sajogyo (1973) dalam survei yang diadakan mencoba menetapkan garis kemiskinan dan menghitung jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, hasil penelitiannya menunjukkan apa yang disebut sebagai garis kemiskinan perkotaan. Garis kemiskinan untuk daerah pedesaan ditetapkan setinggi pendapatan setara ekuivalen 240 kg beras perkapita per tahun, sedangkan untuk perkotaan sebesar 360 kg ekuivalen beras perkapita per tahun.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi di mana seorang hidup dalam kondisi kekurangan materi taraf tertentu untuk memenuhi kebutuhan. Kemiskinan dibagi dalam empat bentuk, yaitu:

- 1) Kemiskinan kultural, mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
- 2) Kemiskinan relatif, kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.
- 3) Kemiskinan absolut, kondisi di mana seseorang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja.
- 4) Kemiskinan struktural, situasi miskin yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

Kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

- 1) Kemiskinan alamiah, berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam dan prasarana umum, serta keadaan tanah yang tandus.
- 2) Kemiskinan buatan, lebih banyak diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak mendapat menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata.

b. Indikator-Indikator Kemiskinan

Menurut Hartomo dan Aziz (1997) individu yang dapat dikategorikan miskin mempunyai beberapa indikator, antara lain:

- 1) Secara umum tidak memiliki faktor produksi material dan nonmaterial. Faktor produksi material meliputi tanah, modal finansial, dan sesuatu dalam bentuk fisik lainnya, sedangkan faktor produksi nonmaterial meliputi kompetensi terapan individu dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) Tertutup kemungkinan bagi seorang individu untuk memperoleh aset produksi dengan sendiri, keterbatasan yang dimiliki individu tersebut menjadi kendala dalam memenuhi syarat dalam memperoleh aset produksi yang diharapkan, sehingga akses untuk memperoleh bantuan terlampaui sulit diperoleh.
- 3) Tingkat pendidikan yang rendah, kemiskinan seseorang bisa diperoleh dari keadaan keluarga yang sebelumnya miskin sehingga kemungkinan yang terjadi aksesibilitas individu tersebut untuk memperoleh jenjang pendidikan yang cukup juga terbatas.
- 4) Mayoritas individu miskin tinggal di pedesaan, keterbatasan lapangan kerja di pedesaan membuat kondisi ekonomi individu tersebut sulit berkembang, mengingat tidak semua penduduk di pedesaan memiliki tanah pertanian sehingga penduduk desa lainnya menjadi buruh tani, kondisi-kondisi tersebut menjadi alasan mayoritas penduduk desa terkurung dalam kondisi miskin.

c. Faktor Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan adalah salahsatu isu utama ekonomi, sama halnya dengan permasalahan lain, kemiskinan juga merupakan permasalahan ekonomi yang dapat diidentifikasi penyebab-penyebabnya. Menurut Hartomo dan Aziz (1997) faktor penyebab kemiskinan, antara lain:

1) Pendidikan yang terlampau rendah

Tingkat pendidikan yang tidak sesuai standar menjadikan seorang individu sulit untuk memperoleh kesempatan kerja karena kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia kerja tidak dimiliki.

2) Keterbatasan lapangan kerja

Jumlah penduduk yang semakin bertambah faktanya tidak diiringi dengan jumlah kesempatan kerja yang mampu menyerap angkatan kerja.

3) Keterbatasan modal

Secara umum permasalahan modal usaha dialami oleh sebagian besar masyarakat karena syarat-syarat yang terlampau sulit untuk dipenuhi, hal tersebut menjadikan masyarakat sulit untuk mengembangkan sektor wirausaha.

4) Keterbatasan sumber daya alam

Suatu daerah yang potensi alamnya terbatas akan sulit dikembangkan karena eksploitasi yang dilakukan tidak mampu membuat daerah tersebut berkembang secara ekonomi. Aktivitas produksi yang terjadi di daerah tersebut tidak memunculkan berbagai inovasi, berbeda dengan daerah yang

memiliki potensi alam yang kaya sehingga mampu memberikan injeksi perekonomian yang lebih maju dan inovatif.

5) Beban keluarga

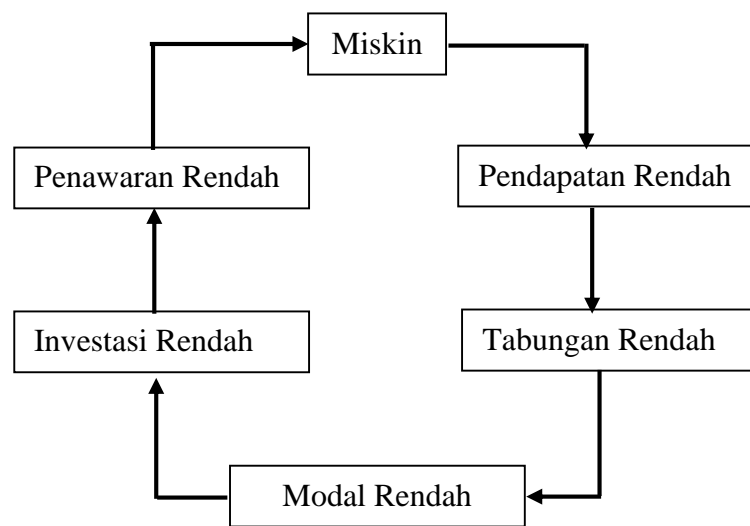
Masyarakat dengan jumlah anggota keluarga yang relatif banyak akan mempengaruhi beban pengeluaran, jika tidak diimbangi dengan perolehan jumlah pendapatan yang mencukupi kebutuhan semua anggota keluarga maka kemungkinan yang terjadi bagi keluarga tersebut adalah kekurangan secara finansial.

Shrarp (1996) dalam Kuncoro (1997), mengidentifikasi penyebab kemiskinan dari segi ekonomi, sebagai berikut:

- Timbulnya kemiskinan secara mikro karena ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang berakibat distribusi pendapatan tidak merata, rata-rata penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dengan jumlah yang terbatas dan kualitasnya pun rendah.
- Adanya kemiskinan disebabkan oleh kualitas sumberdaya manusia (SDM), jika sumberdaya manusia rendah maka tingkat produktifitasnya pun akan rendah dan membuat pendapatan rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia disebabkan karena tingkat pendidikan yang rendah, adanya diskriminasi dan faktor keturunan.
- Faktor penyebab kemiskinan lainnya yaitu tingkat perbedaan akses modal dalam masyarakat.

Menurut Ragnar Nurkse dengan memahami lingkaran yang tidak berujung maka kemiskinan harus diatasi dengan memutus satu mata rantai, misal dengan memutus ketiadaan modal pada penduduk miskin. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan modal bagi penduduk miskin.

Bila yang terjadi dalam kategori kemiskinan kultural berupa faktor internal penduduk miskin itu sendiri, pengatasan masalah nya pun harus secara kultural dan pengatasan faktor-faktor internal. Contohnya dengan melakukan pendidikan dan pelatihan pada penduduk miskin agar kreatif, dinamis dan berkeinginan untuk meraih kemajuan.



GAMBAR 2.1
Lingkaran Setan Kemiskinan

2. Ketimpangan Pendapatan dan Rasio Gini

Pengertian umum pendapatan diartikan sebagai hasil pencarian usaha atau hasil dari penjualan faktor-faktor produksi yang dimilikinya kepada sektor produksi (Boediono, 1992). Pendapatan adalah hasil berupa uang atau materi lainnya yang dapat dicapai dari pada penggunaan faktor-faktor produksi (Winardi, 1992). Hasil tersebut diharapkan menjadi kapabilitas yang berguna (*capabilities to function*) (Todaro, 2006), berfungsi untuk pemenuhan kebutuhan individu. Pendapatan menjadi indikator yang diharapkan dapat menentukan ukuran kondisi ekonomi individu.

Teori yang diungkapkan Simon Kuznets yang menjelaskan siklus distribusi pendapatan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk (tidak merata), namun pada tahap selanjutnya, distribusi pendapatan pada fase selanjutnya cenderung membaik (ketidakmerataan menyusut). Namun dalam pemahaman ekonomi kontemporer teori yang diungkapkan Kuznets tersebut tidak begitu dapat menjelaskan kondisi sesungguhnya karena meskipun siklus itu terjadi semua tetap tergantung pada proses pembangunan yang dilakukan oleh negara yang bersangkutan (Todaro, 2006).

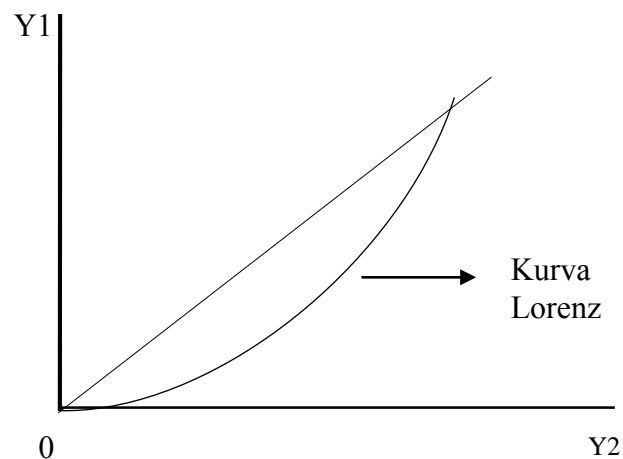
Kondisi ketimpangan pendapatan menyebabkan perbedaan pendapatan yang terjadi karena perbedaan dalam kepemilikan sumberdaya alam dan faktor produksi terutama kepemilikan modal. Keadaan suatu wilayah mempunyai pengaruh yang besar untuk terciptanya pola pembangunan ekonomi,

ketidaksamaan ini berpengaruh terhadap kemampuan untuk berkembang yang mengakibatkan beberapa wilayah mampu tumbuh dengan cepat sementara wilayah lainnya tumbuh dengan lambat. Kemampuan tumbuh ini kemudian menyebabkan terjadinya ketimpangan baik pendapatan maupun pembangunanyang terjadi di Indonesia.

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah dengan Indeks Gini (*Gini Ratio*). Indeks Gini merupakan suatu ukuran pemerataan yang diukur dengan membandingkan luas yang dibentuk antara diagonal dan Kurva Lorenz (distribusi pendapatan) dibagi dengan luas segitiga di bawah diagonal. Daimon dan Thorbecke (1995:5) berpendapat bahwa penurunan ketimpangan (perbaikan distribusi pendapatan) selalu tidak konsisten dengan bertambahnya insiden kemiskinan kecuali jika terdapat dua aspek yang mendasari inkonsistensi tersebut. 1) variasi distribusi pendapatan dari kelas terendah meningkat secara drastis sebagai akibat krisis. 2) merupakan persoalan metodologi berkaitan dengan keraguan dalam pengukuran kemiskinan dan indikator ketimpangan. Dalam Kurva Lorenz, garis diagonal merupakan penjelasan dari pemerataan distribusi pendapatan di setiap titik pada garis diagonal tersebut menunjukkan presentase penduduk yang berada di suatu wilayah yang sama dengan presentase penerimaan pendapatan (Sugianto, Mulya, & Seleky, 2005).

Indeks Gini bernilai antara 0 dan 1. Nilai 0 menunjukkan pemerataan sempurna dimana semua orang mempunyai pendapatan yang persis sama sedangkan nilai 1 menunjukkan ketidakmerataan sempurna (*complete inequality*

atau *perfectly inequal*), dimana seluruh penduduk terpusat di wilayah tertentu. Jadi, semakin besar nilai rasio konsentrasi Gini, semakin besar pula kemungkinan ketidakmerataan antara distribusi penduduk dan jumlah lokasi (sumber: <http://sirusa.bps.go.id>).



Sumber : Hudiyanto 2014

GAMBAR 2.2
Kurva Lorenz

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n f_{pi}x(f_{ci} + f_{c_{i+1}})$$

Keterangan:

GR: Koefisien Gini

F_{pi}: Frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i

F_{ci}: Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas ke-i

F_{ci-1}: Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke i-1

3. Indeks Pembangunan Manusia

a. Pengertian Pembangunan Manusia

United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 memperkenalkan konsep pembangunan manusia (*human development*) sebagai paradigma pembangunan model baru. Memperluas pilihan bagi manusia, yang dapat dilihat dari usaha kearah perluasan pilihan, dan sebagai taraf yang dicapai dalam upaya tersebut. Pembangunan manusia dapat diartikan juga sebagai pembangunan kemampuan manusia dengan cara meningkatkan kesehatan, pengetahuan, serta keterampilan sekaligus sebagai pemanfaatan kemampuan manusia itu sendiri.

United Nations Development Programme (1995) mengenalkan konsep penting dalam pembangunan manusia, antara lain sebagai berikut:

- 1) Empat pilar pokok pembangunan manusia adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan.
- 2) Pembangunan manusia bertujuan untuk meningkatkan kemampuan (kapasitas manusia) serta memanfaatkan kemampuan/kapasitas yang dimiliki manusia itu sendiri secara optimal.
- 3) Manusia sebagai pusat pembangunan
- 4) Pembangunan manusia sebagai dasar dari tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya

5) Tujuan pembangunan sebagai perluasan pilihan bagi manusia dan tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan mereka saja tetapi pembangunan manusia secara komprehensif.

Dalam *Human Development Report (1995) United Nations Development Programme (UNDP)* memperjelas bahwa dalam memperluas pilihan manusia, konsep pembangunan manusia dibangun dari empat unsur pokok, antara lain yaitu:

a) Pemerataan

Masyarakat harus mempunyai akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan yang ada dalam hal ekonomi maupun politik harus dihapuskan sehingga masyarakat dapat berpartisipasi di dalam dan memperoleh manfaat dari peluang-peluang yang ada.

b) Produktivitas

Masyarakat sebaiknya mampu meningkatkan produktivitas serta ikut dalam proses mencari penghasilan dan lapangan pekerjaan. Maka pembangunan ekonomi merupakan bagian dari model pembangunan manusia.

c) Pemberdayaan

Pembangunan dilakukan oleh masyarakat sehingga masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam proses-proses dan pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

d) Kestinambungan

Upaya dalam memperoleh kesempatan seharusnya bisa menjamin tidak hanya diperuntukan pada generasi sekarang akan tetapi untuk generasi mendatang. Segala jenis pemodalan baik itu manusia, fisik, maupun lingkungan hidup sebaiknya harus dipenuhi secara seimbang.

b. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia atau kesejahteraan yang berjalan di suatu daerah berdasarkan komponen dasar kualitas hidup, pengukuran indeks ditunjukkan melalui angka kesehatan, pendidikan, dan hidup layak (Badan Pusat Statistik).

Sementara itu untuk mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup, lalu untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, sedangkan untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (*Purchasing Power Parity*) (Winarti, 2014).

1) Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu faktor yang cukup penting dalam proses pembangunan. Di mana pendidikan merupakan upaya untuk melatih karakter, dan intelektual anak, agar dapat memajukan standar hidup selaras dengan dunianya. Pendidikan yang baik dan berkualitas akan dapat mencetak generasi-generasi yang memiliki daya saing tinggi. Dalam mengukur dimensi

pendidikan penduduk menggunakan dua indikator, yaitu rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf. Untuk mengetahui tingkat pendidikan dapat dilakukan dengan cara menggunakan jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas karena pada usia tersebut rata-rata penduduk sudah banyak yang berhenti sekolah. Proses penghitungan kedua indikator tersebut digabung setelah masing-masing diberikan bobot. Rata-rata lama sekolah diberi nilai sepertiga dan angka melek huruf diberi nilai dua per tiga. Setelah diperoleh angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah dilakukan penyesuaian agar kedua nilai tersebut berada pada skala yang sama yakni antara 0-1, setelah kedua nilai disesuaikan lalu disatukan untuk mendapatkan indeks pendidikan dengan perbandingan bobot 2 untuk angka melek huruf dan 1 untuk rata-rata lama sekolah sesuai dengan yang telah ditentukan UNDP. Dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$IP = \frac{2}{3} \text{ Indeks Lit} + \frac{1}{3} \text{ Indeks MYS} \dots\dots\dots$$

Proses pelaksanaan pembangunan melalui pemberantasan buta aksara adalah upaya penting untuk membenahi indeks manusia, jika program pendidikan berhasil maka akan menumbuhkan rasa percaya diri penduduk, dan mereka berupaya untuk memberantas kemiskinan yang dialami.

2) Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup adalah indeks yang digunakan untuk mengukur jumlah tahun hidup yang diharapkan dapat dinikmati penduduk di suatu wilayah tertentu, dengan cara menggunakan informasi angka kelahiran

serta kematian per tahun. Angka harapan hidup dapat dihitung menggunakan pendekatan tak langsung (*Brass, Varian Trussel*), dalam penghitungan angka harapan hidup ada dua jenis data yang digunakan yaitu anak lahir hidup dan anak masih hidup dari wanita yang sudah menikah. Secara singkat proses perhitungan angka harapan hidup ini disediakan oleh program Mortpark. Untuk mendapatkan Indeks Harapan Hidup dengan cara menstandarkan angka harapan hidup terhadap nilai maksimum dan minimumnya.

3) Standar Hidup Layak

Dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak, aspek kehidupan yang layak diukur dari daya beli masyarakat, UNDP menggunakan Produk Domestik Bruto (PDRB) riil yang disesuaikan. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan akan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli PPP (*Purchasing Power Parity*). Untuk menghitung IPM sub nasional (provinsi atau kabupaten/kota) tidak memakai PDRB per kapita karena PDRB per kapita hanya mengukur produksi suatu wilayah dan tidak mencerminkan daya beli riil masyarakat yang merupakan perhatian IPM. Sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan data rata-rata konsumsi 27 komoditi terpilih dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dianggap paling dominan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan telah distandarkan agar bisa dibandingkan antar daerah dan antar waktu yang disesuaikan dengan indeks PPP (*purchasing power parity*).

4. Jumlah Penduduk

a. Definisi Penduduk

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Penduduk adalah sekelompok orang yang berdomisili di wilayah geografis republik Indonesia terhitung selama enam bulan atau lebih, serta mereka yang bertujuan untuk menetap dan tercatat sah sebagai penduduk walaupun kurang dari enam bulan berdomisili di wilayah Republik Indonesia. Terjadinya pertumbuhan penduduk disebabkan oleh 3 komponen, yaitu:

1) Fertilitas

Fertilitas adalah istilah demografi yang diartikan sebagai hasil reproduksi nyata dari seorang wanita atau sekelompok wanita, dengan kata lain fertilitas ini merupakan gambaran mengenai jumlah kelahiran hidup dalam suatu wilayah pada periode waktu tertentu.

2) Mortalitas

Mortalitas atau yang dikenal dengan kematian adalah satu dari ketiga komponen demografi yang dapat mempengaruhi perubahan penduduk. Dalam hal ini tinggi rendahnya tingkat mortalitas disuatu wilayah dengan wilayah lain tentu saja berbeda, mortalitas (kematian) keadaan menghilangnya tanda-tanda kehidupan secara permanen, dan dapat terjadi kapan saja setelah kelahiran hidup. Pengumpulan data kematian sangat diperlukan yaitu untuk proyeksi penduduk guna dalam proses perencanaan pembangunan, data kematian pun diperlukan untuk

kepentingan evaluasi terhadap program-program yang menyangkut soal kependudukan.

3) Migrasi

Migrasi adalah proses berpindahnya penduduk dari suatu tempat ke tempat lain yang melewati batas wilayah tertentu. Migrasi sendiri merupakan bentuk respon dari penduduk untuk meningkatkan standar hidup yang layak dan kesejahteraan hidupnya, penduduk bermigrasi dari pedesaan menuju ke perkotaan disebabkan lebih banyaknya lapangan pekerjaan yang ada di perkotaan. Dampak dari migrasi itu sendiri mengakibatkan ketidak mampuan wilayah perkotaan menampung penduduk yang berdatangan dari berbagai wilayah di pedesaan.

Manusia sudah sejak lama memperhatikan tentang masalah kependudukan, banyak para ahli ataupun negarawan yang membicarakan terkait keseimbangan jumlah penduduk berdasarkan pertimbangan sosial, politik, dan ekonomi. Permasalahan kependudukan didasari atas perspektif tentang pentingnya jumlah penduduk yang tetap dipertahankan maupun ditingkatkan (Samadi, 2006).

Pendapatan perkapita adalah salah satu indikator yang penting dalam mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu negara. Peran serta penduduk di suatu negara menjadi sangat penting dalam proses pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan akan berjalan baik jika

penduduknya memiliki kualitas dan kapasitas sehingga tujuan pembangunan dapat dicapai. Maka, pemerintah selalu memberikan perhatian dalam proses pengembangan kapasitas dan kualitas penduduk baik berupa regulasi maupun program yang mampu menjadi *trigger* untuk mengembangkan perekonomian. Untuk mengetahui besaran kualitas penduduk di suatu negara dapat dilihat melalui besarnya nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang dapat dikalkulasi melalui tiga indikator, antara lain: pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.

Meningkatnya jumlah penduduk di suatu daerah dapat menjadi faktor penghambat atau pendorong dalam proses pembangunan ekonomi, bertambahnya jumlah penduduk menjadi faktor penghambat seperti banyaknya penduduk tetapi tidak dibarengi dengan keterampilan atau skill yang menunjang karena pendidikan rendah atau karena faktor-faktor penghambat lainnya, akibatnya akan berpengaruh pada penurunan tingkat produktifitas dan banyaknya jumlah pengangguran dalam suatu daerah (Sukirno, 1997).

Oleh karena itu dalam proses pembangunan suatu daerah atau negara dibutuhkan pemerataan khususnya dalam sektor pendidikan karena sangat penting untuk menunjang kualitas sumberdaya manusia yang ada di suatu daerah.

b. Struktur Penduduk

Seiring dengan penduduk yang terus bertambah maka jumlah tenaga kerja pun akan bertambah, jika dilihat dari pertumbuhan penduduk

memungkinkan suatu negara untuk menambah produksi. Selain itu, dampak dari pelatihan, pendidikan, dan pengalaman kerja, akan memengaruhi kualitas kemampuan penduduk itu sendiri, dengan kemampuan yang meningkat, produktivitas pun ikut meningkat dan akan mendorong bertambahnya jumlah produksi.

Usia dan jenis kelamin adalah karakteristik penduduk yang paling pokok, komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin paling sering digunakan dalam berbagai bidang.

Samadi (2006), komposisi penduduk berdasarkan usia dikenal dengan struktur penduduk, penduduk berdasarkan usia dibagi menjadi beberapa kelompok usia. Pada umumnya setiap kelompok memiliki jarak antara usia lima tahun, contohnya 0-4, 5-9, 10-14,....60-60, 65+. Struktur penduduk berbeda antara negara yang satu dengan negara lainnya, antara pedesaan dan perkotaan, maupun antara pulau yang satu dengan pulau lainnya. Tiga faktor demografis yang memengaruhi Struktur Penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi.

Berdasarkan pengelompokan tersebut, Struktur Penduduk dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu sebagai berikut:

- 1) Usia 0-14 tahun disebut usia muda (usia belum produktif). Wilayah atau negara yang termasuk dalam Struktur Penduduk muda, sebagian besar penduduk yang tinggal di wilayah atau negara tersebut berusia muda.
- 2) Usia 15-64 tahun disebut usia dewasa (usia produktif atau usia kerja). Wilayah atau negara yang termasuk dalam Struktur Penduduk dewasa,

sebagian besar penduduk yang tinggal di wilayah atau negara tersebut berusia dewasa.

- 3) Usia 65 tahun dan lebih disebut usia tua (usia tidak produktif). Wilayah atau negara yang termasuk dalam Struktur Penduduk usia tua, sebagian besar penduduk yang tinggal di wilayah atau negara tersebut berusia tua.

B. Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen

1. Pengaruh Rasio Gini terhadap Tingkat Kemiskinan

Berkembangnya ketidakmerataan distribusi pendapatan dan penghapusan kemiskinan merupakan salah satu masalah pembangunan, terutama di negara yang sedang berkembang. Melalui pembahasan mengenai masalah ketidakmerataan dan kemiskinan dapat dijadikan dasar untuk menganalisis masalah pembangunan yang lebih khusus seperti pertumbuhan penduduk, pembangunan pedesaan, pendidikan, pengangguran, dan sebagainya. Cara yang sederhana untuk mendekati masalah distribusi pendapatan dan kemiskinan yaitu dengan menggunakan kerangka kemungkinan produksi (Lincoln Arsyad, 1997).

Pengaruh antara ketimpangan distribusi pendapatan terhadap kemiskinan dipengaruhi oleh adanya peningkatan jumlah penduduk. Bertambahnya penduduk cenderung berdampak negatif terhadap penduduk miskin, terutama bagi masyarakat yang sangat miskin. Sebagian keluarga miskin memiliki jumlah anggota keluarga yang banyak sehingga kondisi perekonomian berada di bawah garis kemiskinan, seiring dengan memburuknya ketimpangan pendapatan atau kesejahteraan (Todaro, 2000).

2. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan

Teori pertumbuhan baru menekankan akan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*) dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Dapat dilakukan dengan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dapat dilihat dengan meningkatnya keterampilan dan pengetahuan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahliannya akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Perusahaan mendapat hasil yang lebih banyak dengan mempekerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi, sehingga perusahaan akan memberikan upah yang lebih tinggi pada yang bersangkutan. Di sektor informal seperti pertanian, peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja akan mampu meningkatkan hasil pertanian karena tenaga kerja mampu meningkatkan hasil pertanian karena tenaga kerja yang terampil mampu bekerja lebih efisien. Pada akhirnya yang memiliki produktivitas tinggi akan mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik, di perhatikan melalui adanya peningkatan pendapatan maupun konsumsinya. Rendahnya produktivitas kaum dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan (Rasidin K dan Bonar M, 2007).

3. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan

Jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan permasalahan yang mendasar (Kuncoro, 1997). Sebab

pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan rakyat dan menekan angka kemiskinan. Terdapat dua pandangan yang berbeda mengenai pengaruh penduduk pada pembangunan. Pertama, yaitu pandangan pesimistis yang berpendapat bahwa penduduk (pertumbuhan penduduk yang pesat) dapat membawa dan mendorong pada pengurasan sumberdaya, kerusakan lingkungan, kekurangan tabungan, yang kemudian dapat memunculkan masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, keterbelakangan dan kelaparan. Kemudian yang kedua adalah pandangan optimis yang menyatakan bahwa penduduk adalah aset yang memungkinkan untuk mendorong pengembangan ekonomi sehingga dapat mendorong perbaikan kondisi sosial. Para peneliti pembangunan ekonomi telah ada consensus bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak hanya berdampak buruk terhadap *supply* bahan pangan, cadangan devisa, dan sumberdaya manusia.

Todaro (2000), tingginya jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kemiskinan, dibuktikan dengan perhitungan indeks Foster Greer Thorebecke (FGT), dengan uji tersebut jika jumlah penduduk semakin bertambah pada suatu negara atau daerah maka kemiskinan pada negara atau daerah tersebut pun akan meningkat.

Dalam kehidupan manusia memiliki proses, sejak lahir hingga meninggal. Namun dalam daur ulang kehidupan tersebut terdapat penduduk usia produktif, penduduk dalam usia produktif berusia pada rentang 15-65

tahun. Penduduk yang produktif akan membantu dalam kelancaran dari segi perekonomian dan pembangunan dalam suatu wilayah (bkkbn.go.id).

C. Hasil Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas bagaimana pengaruh Rasio Gini, Indeks Pembangunan Manusia, dan Jumlah Penduduk dalam mengurangi kemiskinan. Penelitian-penelitian ini dilakukan di berbagai daerah di Indonesia dengan variabel yang berbeda.

1. Husnul khotimah (2015), meneliti mengenai “Analisis Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto, dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di provinsi D.I Yogyakarta”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Variabel Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di D.I Yogyakarta, Variabel Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di D.I Yogyakarta, dan variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di D.I Yogyakarta.
2. Prastyo (2010), meneliti mengenai “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan”. Tulisannya ini meneliti tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan ekonometrika dengan menggunakan metode Panel Data. Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, variabel upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, variabel pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan variabel pengangguran memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

3. Nurhayati (2007), meneliti tentang faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan di Jawa Barat 2004 dengan menggunakan model ekonometrika persamaan simultan 2SLS menghasilkan faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan pada taraf nyata 10 persen adalah pendapatan dan pendidikan.
4. Wiraswara (2005), hasil penelitian ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap angka kemiskinan di Indonesia. Dalam penelitian ini terdapat variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia. Variabel-variabel adalah angka melek huruf, keterjangkauan rumah tangga terhadap listrik dan dummy kabupaten/kota di Jawa. Ketiga variabel ini menurut data tahun 2002 memiliki kemampuan untuk mengurangi angka kemiskinan. Angka kemiskinan lebih tinggi dari kabupaten/kota di luar Jawa dan persentase penduduk melek huruf kabupaten/kota di Jawa lebih rendah dari kabupaten di kabupaten/kota di luar Jawa. Kabupaten/kota di Jawa lebih unggul dalam persentase rumah tangga yang terjangkau listrik.

5. Whisnu Adhi Saputra (2011), meneliti tentang “Analisis pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, dan Pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota di Jawa Tengah (2005-2008)”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi panel data. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, variabel PDRB dan IPM berpengaruh negatif dan signifikan dan Pengangguran berpengaruh negatif tidak signifikan.
6. Ida Sholekah (2016), meneliti tentang “Analisis pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Pendidikan (AMH) terhadap kemiskinan di DKI Jakarta (studi kasus kabupaten/kota Adm di provinsi DKI Jakarta, (2008-2014)”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Hasil penelitian menunjukkan variabel jumlah penduduk, tingkat pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Jika secara statistik TPT berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.
7. Prima Sukmaraga (2011), meneliti tentang “Analisis pengaruh IPM, PDRB/capital, dan Jumlah Penduduk miskin di provinsi Jawa Tengah (2008)”. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel IPM dan PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, dan variabel pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan.
8. Angga tri Widiastuti (2016), meneliti tentang “Analisis pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di kabupaten/kota di Jawa Tengah

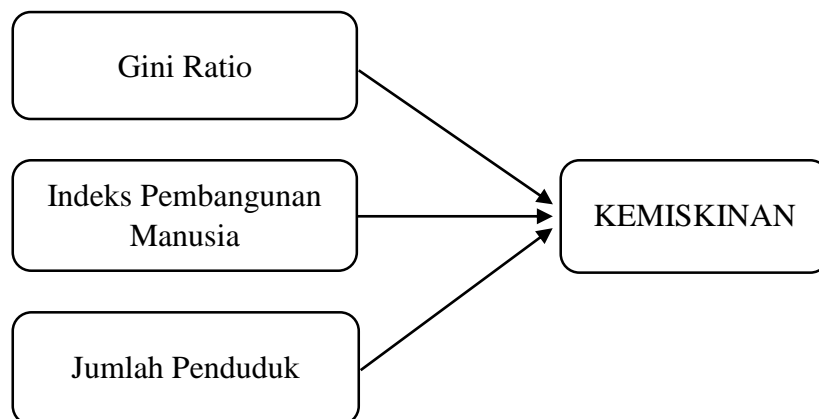
(2013)”. Penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel PDRB, Jumlah Penduduk, dan IPM berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, jadi variabel itu semua patut dipertimbangkan untuk mengatasi masalah kemiskinan.

9. Hudaya (2009), meneliti tentang “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Indonesia”. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan data panel dengan menggunakan E-Views 5.1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya variabel tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, variabel Pendapatan Perkapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, variabel Angka Melek Huruf berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.
10. R. Gunawan Setianegara (2008), meneliti tentang Ketimpangan Distribusi Pendapatan, Krisis Ekonomi dan Kemiskinan, bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketimpangan pendapatan yang dipengaruhi oleh krisis ekonomi memengaruhi jumlah penduduk miskin di Indonesia. Penelitian ini menggambarkan bagaimana keadaan ketimpangan pendapatan Indonesia dimulai dari tahun 1960-an hingga akhir tahun 1999 menggunakan alat pengukur ketimpangan yaitu Gini Rasio. Menurut Gunawan, ada banyak analisis yang membuktikan bahwa walaupun tingkat pertumbuhan tinggi akan selalu menyebabkan tingkat ketimpangan pendapatan tinggi. Selain itu jumlah penduduk miskin di

Indonesia juga akan selalu berubah seiring tinggi rendahnya tingkat ketimpangan pendapatan.

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di muka, maka dalam penelitian ini, Tingkat Kemiskinan sebagai variabel dependen dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu Gini Rasio, Indeks Pembangunan Manusia, dan Jumlah penduduk di mana ketiga variabel tersebut adalah variabel independen. Untuk mempermudah pemahaman konseptual dalam penelitian ini, maka di gambarkan suatu kerangka pemikiran sebagai berikut:



GAMBAR 2.3

Kerangka Pikir

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan yang masih bersifat sementara atas permasalahan dalam penelitian yang memerlukan pembuktian secara empiris lebih lanjut. Berdasarkan beberapa kajian empiris yang telah dilakukan penelitian-penelitian terdahulu, maka didapat hipotesis sebagai berikut:

- H₁: Diduga variabel Gini Ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.
- H₂: Diduga variabel Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.
- H₃: Diduga variabel Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.